

DRAF POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD UNTUK RKPD 2021

BIDANG KESRA (PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL)

Oleh : Imam Sujangi

I. Pendahuluan

Untuk menyusun pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD 2021 maka kami menggunakan basis data capaian kinerja pemerintah DIY sampai dengan tahun 2018. Dan dibandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang mencapai angka 79.59 dari target 80.29 (relaisasi 99.13%). Selain itu pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2018 mencapai rekor dengan angka pertumbuhan 6.2% lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Total APBD DIY tahun 2018 sebesar 5.544 Milyar dan agregat se-DIY sebesar 15.424 Milyar. Namun ada beberapa indikator penting yang setiap tahun menjadi catatan dan rekomendasi DPRD yakni Angka Kemiskinan, Indeks Ketimpangan (Gini) dan Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Tahun 2018, angka kemiskinan sampai dengan September 2018 sebesar 11.81% dari target yang direncanakan sebesar 11.23% (realisasi 94.83%). Garis Kemiskinan (GK) per September adalah 414.899. Angka 11.81% tersebut ekuivalen dengan jumlah penduduk miskin 450.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.080 orang. Dan jika menggunakan indikator jumlah penduduk miskin, target 2018 tercapai karena di patok target 484.947 jiwa. Realisasi jumlah penduduk miskin versus target adalah 107.7%. Dengan demikian maka laju rata-rata penurunan kemiskinan selama Sept 2013 - Sept 2018 adalah sebesar 0.644%.

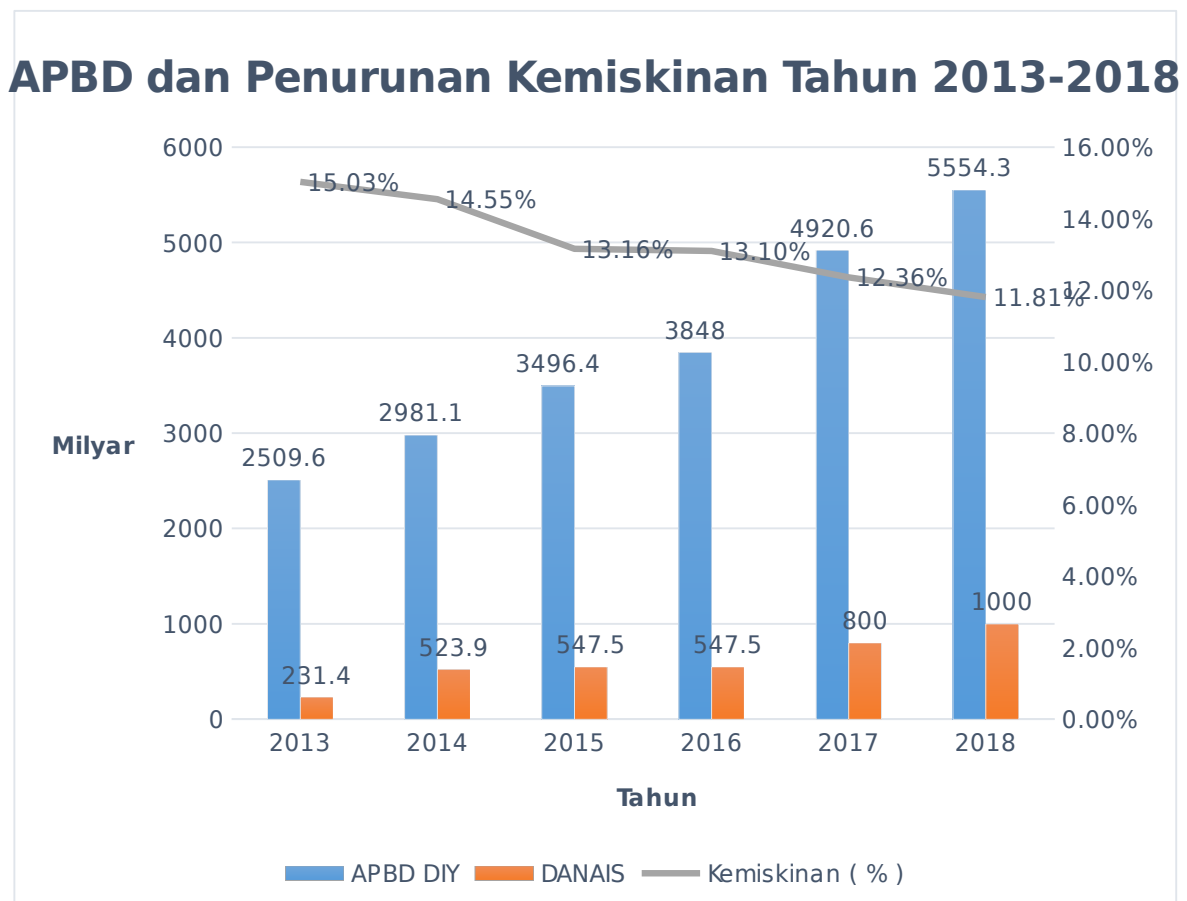
Sebagai perbandingan angka kemiskinan nasional per September 2018 adalah 9.66%. jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa maka DIY termasuk yang paling tinggi. Jawa Tengah 11.81%, Jawa Timur 11.19%, Banten 10.85%, Jawa Barat 7.25% dan DKI sebesar 3.55%. Jika kita melihat angka kemiskinan per kabupaten/kota terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara wilayah kota Jogja (6.98%) dan Kabupaten Sleman (7.65%) dengan tiga kabupaten yang lain yaitu Bantul (13.43%), Gunungkidul (17.12%) dan Kulonprogo (18.30%) seperti terlihat pada Tabel 4.4 (hal 4-9) LKPJ 2018.

Dari sisi kemampuan keuangan faktanya dari tahun ketahun selalu meningkat. Kemampuan keuangan pemda DIY terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Demikian juga anggaran dari sumber Dana Keistimewaan (Danais) yang juga naik dari tahun ketahun.

TAHUN	APBD DIY	DANAIS	Kemiskinan (%)	Laju
Tahun 2013	2.509.569.218.343	231.4 milyar	15.03	
Tahun 2014	2.981.068.320.421	523.9 milyar	14.55	0.48
Tahun 2015	3.496.425.502.266	547.5 milyar	13.16	1.39
Tahun 2016	3.847.962.965.846	547.5 milyar	13.10	0.06
Tahun 2017	4.920.626.776.618	800 milyar	12.36	0.79
Tahun 2018	5.554.331.177.406	1 trilyun	11.81	0.55
Tahun 2022	(berdasar RPJMD)		7	

Catatan : GK Tahun 2017 Rp 396.271

GK Tahun 2018 RP 414.899



Dan sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang DIY, untuk mendukung kewenangan urusan keistimewaan DIY pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus (Danais) yang naik dari tahun ketahun. Terlihat bahwa kenaikan kemampuan keuangan pemda DIY hanya

berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Kenaikan APBD dari tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Sejak 2013 sampai 2018 laju penurunan kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai angka 1.39%, dan laju terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0.06% dalam satu tahun. Dan secara rata-rata dalam enam tahun terakhir laju penurunan kemiskinan sebesar 0.644% pertahun. Sementara target yang di patok dalam RPJMD 2017 - 2022 adalah menjadi 7 % di tahun 2022. Berat namun harus optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan ikhlas maka bukan hal yang mustahil angka 7% dapat di capai di akhir periode Gubernur tahun 2022 yang akan datang.

Dari grafik di atas terlihat dengan jelas bahwa angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah yang makin besar tidak serta merta di ikuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang sama. Ada factor-faktor diluar kemampuan keuangan daerah yang perlu di perhatikan. Ketepatan startegi, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian sangat penting mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan DIY.

Menurut BPS ditemukan adanya data yang tidak akurat dalam hal data penduduk miskin. Sehingga diperlukan koreksi data. Secara metodologi salah satu factor penting untuk mengukur angka kemiskinan adalah apa yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Pada tahun 2018 angka GK DIY sebesar 414.899, naik jika dibandingkan dengan GK tahun 2017 yang berada pada angka 396.271. Jumlah anggota keluarga di DIY rata-rata adalah 4.22 jiwa. Dengan demikian sebagai suatu keluarga dikategorikan miskin adalah ;

$$414.899 \times 4.22 \text{ jiwa} = 1.750.874$$

Porsi terbesar untuk konsumsi (71.36%)

Apabila suatu keluarga jumlah pengeluaran kurang dari angka tersebut maka akan di kategorikan sebagai keluarga miskin.

Dengan memahami secara metodologis BPS tersebut maka yang dapat di lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat di tempuh dengan pendekatan sebagai berikut.

II. Urusan Pendidikan

Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY? Menurut pakar peraih hadiah nobel Jeffry Sach yang mengatakan “ **orang bodoh karena**

misikin, dan orang miskin karena bodoh” (poverty trap). Untuk memutus jebakan tersebut maka pendidikan harus di lakukan dan di intervensi oleh pemerintah. Jumlah penduduk DIY berdasar BPS tahun 2019 berjumlah 3.818. 266. Dari jumlah tersebut jumlah, yang masih berada pada usia sekolah (7-18 tahun) ada sebanyak 17,54% atau sejumlah 669.723 anak dan 89,64% (600.340 anak) penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah maupun khusus. Sementara yang 10,36% penduduk usia sekolah tersebut tidak ada keterangan. Masih ada 69.383 anak yang belum diketahui status pendidikannya.

Salah satu parameter untuk melihat kinerja urusan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Capaian pemerintah DIY untuk parameter ini adalah 9.24 tahun (2017) naik dari 9.10 tahun (2016). Namun untuk LKPJ 2018 ini capaian rata-rata lama sekolah tidak lagi disampaikan. Demikian juga untuk parameter angka melek huruf yang pernah mencapai angka 94.64 pada tahun 2017. LKPJ 2018 menyampaikan capaian indikator kinerja program pemda yaitu Harapan Lama Sekolah, yang di definisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angkanya adalah 15.55 yang merupakan angka proyeksi (menunggu publikasi data resmi BPS) dengan mempertimbangkan tren capaian 2014-2018. Mengapa parameter rata-rata lama sekolah untuk 2018 tidak disampaikan. Demikian juga untuk angka melek huruf.

Jika dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus di tingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah selama 2014-2018 menunjukkan angka fluktuatif dengan rata-rata APK 92.88 (Gambar 1.13) buku LKPJ 2018.

Dengan melihat data-data tersebut program wajib belajar 12 tahun perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Dan kewenangan pendidikan sekolah menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasar UU 23 Tahun 2014.

Dari masalah kuantitas, untuk sekolah menengah DPRD juga melihat masalah kualitas yang masih perlu di tingkatkan. Dari data jumlah pengangguran terbuka, yang pada tahun 2018 berjumlah 73.350 orang, bertambah 9.331 orang, jika dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 64.019 orang. Dan hal ini meningkatkan capaian TPT yang tahun 2018 sebesar 3.35% dar target 2.78% (realisasi 82.98%).

Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif berusia di bawah 35 tahun yang jumlahnya mencapai 89,59% naik jika dibandingkan dengan proporsi di tahun 2014 yang sebesar 78,80%. Dan pengangguran menurut pendidikan didominasi

pendidikan menengah (SMA dan SMK) yakni 46,51%, sementara yang berpendidikan diploma dan sarjana mencapai 21,26%

Apakah hal ini ada hubungannya dengan kualitas hasil pendidikan menengah kita?. Berdasar laporan yang ada bahwa angka ujian nasional SMK tahun 2018 mengalami penurunan. Hasil ujian nasional SMK sebesar 54.77, jauh dari target yakni 57.65 (95%), dan mengalami penurunan dibanding capaian 2017 yakni 57.43. Hal itu tidak terjadi pada SMA. Rata-rata hasil ujian nasional: SMA 62.5 dari target sebesar 57.45 (realisasi 108.79%) dan naik dibanding 2017 yang mencapai 57.39. Sasaran akhir RPJMD yakni tahun 2022 untuk rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah 58.41 dan untuk SMK adalah 58.29.

Jika di lihat dari persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di laporkan bahwa sekolah yang telah memenuhi SNP > 90 adalah sebesar $156/460 \times 100\% = 33.91\%$, meliputi SMA sebanyak 52 dari 163 sekolah, SMK sebanyak 79 dari 218 sekolah dan SLB sebanyak 25 dari 79 sekolah. Dari capaian SNP > 90 masih banyak sekolah menengah yang difasilitasi agar bisa memenuhi SNP yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu di tingkatkan. Di laporkan dalam LKPJ 2018 bahwa jumlah pemuda kader aktif bertambah sebanyak 217 pemuda, yakni dari 6567 pemuda menjadi 6784. Perlu upaya yang lebih keras dan tepat sasaran agar pemuda kita tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausahaan (entrepreneurship) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi kita.

Untuk Prosentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju (realisasi 25 atau 419%) SMK/SMA/SLB hasilnya 18/29/39 atau sangat baik 25/baik 38/cukup 27/kurang sebanyak 10 sekolah. Pendidikan berbasis budaya sangat penting mengingat pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini terutama melalui sekolah agar nantinya lulusan peserta didik kita, tidak hanya pintar secara ilmu pengetahuan dan ketrampilan namun juga memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik.

III. Urusan Kesehatan

Untuk urusan kesehatan bertujuan untuk memperbaiki umur harapan hidup (UHH). UHH DIY termasuk tinggi, jika dibandingkan propinsi lain, yakni 74. 87 tahun. Memang belum mencapai target yang di harapkan yakni 75.06 (realisasi 99.74%). Sejumlah parameter kesehatan terus di usahakan untuk diperbaiki, seperti; angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu,

bayi dan balita masih mengalami kecenderungan naik. Pada tahun 2017 angka kasus kematian sebesar 313. Dan angka kematian balita 343 kasus. Untuk angka kematian ibu (AKI) tahun 2017 sebanyak 34 kasus. Tahun 2018 tidak ada laporan. Untuk angka prevalensi kurang energy protein (KEP) tahun 2018 sebesar 7.94% mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar 8.26%

Di laporkan bahwa berdasar hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, masih da prevalensi penyakit menular seperti infeksi saluran pernafasan (ISPA) Pneumonia, Tuberculosis TB Paru, diare, malaria dan filariasis walaupun masih dibawah angka nasional. Namun untuk penyakit yang tidak menular seperti kanker, stroke, ginjal kronis, diabetes, jantung dan hipertensi menunjukkan prevalensi melebihi angka nasional. Penyakit lain seperti HIV AIDS dan TB terus bertambah.

Untuk capaian indicator urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD ada empat indictor dan hasilnya mencapai realisasi 100% bahkan lebih. Sebagai contoh indicator kinerja sasaran persentase pukesmas melaksanakan program jogja sehat dengan pendekatan keluarga. Target 67.77, dan realisasi 100 sehingga capainnya adalah 149%. Namun yang perlu di perhatikan adalah keterkaitan antara capaian indicator ini dengan masih tingginya angka kejadian penyakit menular sebagaimana dipaparkan di atas. Demikian juga dihubungkan dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita serta KEP (gizi buruk). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita dari tahun ketahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3 T (terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan yang tertandar dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah dari kematian perlu diperhatikan.

Demikian juga dengan capaian persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 64.89% terealisasi 66.41%. Hal ini patut kita apresiasi dimana akreditasi memberi jaminan akan pelayanan kesehatan yang terstandard di unit-unit pelayanan kesehatan kita. Namun yang masih memprihatinkan kita adalah belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama Rumah Sakit dan ketersediaan dokter spesialis. Dari IPM kita bisa melihat banyak hal. IPM DIY adalah 79.59 yang merupakan akumulasi dari IPM per Kabupaten/Kota. IPM Kota Jogja 85.49, Sleman 82.85, Bantul 78.67, Kulonprogo 73.23 dan Gunungkidul 68.73. Dengan demikian DPRD terus mendorong agar ada political will untuk memberikan prioritas kebijakan dan anggaran untuk mengurangi kesenjangan diberbagai bidang pemerintahan.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terkait dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika program dan kegiatan yang ada belum Nampak hasilnya

maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahun.

IV. Urusan Sosial

Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin DIY dari target sebesar 484.947 dan diturunkan tahun 2018 dengan realisasi sebesar 450.250 (realisasi sebesar 107.7%) perlu mendapatkan apresiasi. Walaupun secara prosentase jumlah penduduk miskin angka tersebut belum tercapai. Sebab sampai dengan September 2018 adalah 11.81% dari target 11.23%. Pemerintah DIY telah melakukan terobosan yakni dengan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme dilakukan dengan Bantuan Keuangan Khusus merealisasikan 301 KPM PKH graduasi di 5 kabupaten/kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp 2.300.000 Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan tahapan pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang di tempuh dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahun 1; kegiatan yang dilaksanakan yaitu kabupaten/kota mengusulkan by name by address KPM PKH, yang telah graduasi selanjutnya dilakukan sosialisasi dan assessment bimbingan motivasi dan seterusnya.
- 2) Tahun 2 ; focus kegiatan pada peningkatan kapasitas KPM yang masih bertahan sampai dengan ahir tahun pertama. KPM akan diberikan penguatan dengan kegiatan berupa family development session program kemampuan peningkatan keluarga (P2K2).
- 3) Tahun 3 ; penambahan modal usaha sebagai bentuk penghargaan bagi KPM PKH yang berhasil. Keberhasilan pemberdayaan KPM PKH graduasi dengan memperhatikan tiga aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Dari pemerintah pusat penanganan kemiskinan melalui program PKH ditahun 2018 pemerintah DIY telah merealisasikan peyaluran PKH sampai dengan tahun IV sejumlah 213.557 KPM, dari KPM tersebut anaknya yang sekolah sampai jenjang perguruan tinggi ad 5.692 anak. Selain itu juga ada program bantuan pangan non tunai di DIY sebanyak 317.210 KPM.

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY bekerjasama dengan Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi. Apakah dari sejumlah warga yang telah menerima KPM PKH tersebut yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sudah bisa mandiri, menjadi wirausaha mandiri

dan berapa nilai omset atau jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan program ini. LKPJ 2018 terlu memberikan laporan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Data jumlah penerima manfaat juga perlu di sampaikan per Kabupaten/Kota untuk melihat sejauhmana distribusinya. Jangan sampai program ini tidak mencerminkan problem DIY yang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan maupun wilayah).